

Reformasi Transportasi Sultra: Maju, Aman Sejahtera dan Religius (Kajian Kritis terhadap Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2030)

Syaiful¹, Maudhy Satyadharma^{2*}

¹⁻²Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

*Penulis korespondensi: maudhymaudhy@gmail.com¹

Abstract. *Transportation development is a key foundation for increasing economic growth, regional connectivity, and the quality of public services. In Southeast Sulawesi, Governor Andi Sumangerukka's vision of "Advanced, Safe, Prosperous, and Religious" demands a transportation transformation that focuses not only on physical development but also on governance, technology, sustainability, and the socio-cultural values of the community. This article presents a critical review of this vision and mission by examining the readiness of the transportation sector, the role of the Provincial Transportation Agency, the opportunities and challenges of transformation, and policy recommendations. This study employed a qualitative approach. The research activities were conducted at several transportation infrastructure facilities under the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency for two months, from September to October 2025. The study shows that although the development direction reflects the strategic needs of the archipelago, significant challenges remain, such as inter-island connectivity, gaps in transportation services, data digitization, and a culture of safety. Pentahelix-based, ecological, and technology-based transportation reforms are key to achieving the regional development vision.*

Keywords: *Department of Transportation; Governor's Vision; Public Policy; Transportation Reform; Transportation*

Abstrak. Pembangunan transportasi merupakan fondasi utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan kualitas pelayanan publik. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, visi “Maju, Aman Sejahtera dan Religius” yang diusung Gubernur Andi Sumangerukka menuntut adanya transformasi transportasi yang bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola, teknologi, keberlanjutan, dan nilai-nilai sosial-kultural masyarakat. Artikel ini menyajikan kajian kritis terhadap visi dan misi tersebut dengan menelaah kesiapan sektor transportasi, peran Dinas Perhubungan Provinsi, peluang dan tantangan transformasi, serta rekomendasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan penelitian dilakukan di beberapa sarana prasarana transportasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, mulai dari September hingga Oktober 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun arah pembangunan telah mencerminkan kebutuhan strategis wilayah kepulauan, masih terdapat tantangan signifikan seperti konektivitas antarpulau, kesenjangan layanan transportasi, digitalisasi data, dan budaya keselamatan. Reformasi transportasi berbasis Pentahelix, ekologi, dan teknologi menjadi kunci pencapaian visi pembangunan daerah.

Kata kunci: Dinas Perhubungan; Kebijakan Publik; Reformasi Transportasi; Transportasi; Visi Gubernur

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas 17 kabupaten/kota dengan karakter geografis yang menantang (Nusriah, 2025). Kondisi tersebut menjadikan sektor transportasi sebagai urat nadi pembangunan, baik dalam konteks mobilitas manusia maupun distribusi barang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka mengusung visi “Maju, Aman Sejahtera dan Religius” yang meletakkan transportasi sebagai salah satu instrumen strategis peningkatan kesejahteraan masyarakat (Trijaya Kendari, 2025).

Hal itu dapat dimaknai bahwa transportasi sangat berperan penting dalam membuka akses ekonomi, membuka kesenjangan wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, juga kebijakan pada sektor transportasi diharapkan dapat merefleksikan nilai keamanan transportasi serta mendorong pelayanan public yang menjadikan Sulawesi Tenggara lebih maju dan menerapkan prinsip religiusitas yang menjadi identitas sosial budaya masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun demikian, upaya transformasi transportasi tidak dapat dipandang hanya pada aspek pembangunan infrastruktur (Bangsawan, 2024). Reformasi transportasi harus menyentuh dimensi tata kelola, sistem layanan, teknologi, keselamatan, pemberdayaan masyarakat, hingga nilai religiusitas yang dijahit secara substantif ke dalam kebijakan (A. R. Sari, 2024). Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana visi dan misi gubernur dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan transportasi yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara memegang peranan penting sebagai pelaksana kebijakan, pengendali layanan, dan penghubung antara pemerintah daerah, operator transportasi, serta masyarakat. Reformasi transportasi yang dimaksud bukan sekadar memperbaiki jalan, pelabuhan, atau terminal, tetapi menciptakan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, aman, ramah lingkungan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai reformasi transportasi di Sulawesi Tenggara sangat mendesak dilakukan karena kondisi geografis kepulauan menuntut kebijakan yang tepat, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Kompleksitas tantangan seperti keterbatasan akses antarpulau, kesenjangan infrastruktur, rendahnya kualitas layanan, serta budaya keselamatan yang belum optimal memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif.

Penelitian ini juga penting diharapkan dalam memberikan masukan objektif kepada Pemerintah Provinsi dan Dinas Perhubungan dalam merumuskan program yang lebih terarah, berbasis data, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan data lapangan yang akurat, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkelanjutan untuk mendukung peningkatan layanan transportasi di Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mempercepat transformasi transportasi yang mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara.

2. KAJIAN TEORITIS

Reformasi Transportasi

Reformasi transportasi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem mobilitas daerah mampu menjawab tuntutan ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berkembang (Yunus et al., 2024). Proses reformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga pembenahan tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan keselamatan, dan efisiensi operasional. Transformasi ini menuntut kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media melalui pendekatan Pentahelix. Dengan reformasi yang komprehensif, sektor transportasi dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas wilayah, dan memastikan akses layanan publik yang lebih merata serta berkeadilan (Sulistyo & Satyadharma, 2025).

Konsep terkait Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas wilayah dalam menyediakan layanan, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Damanik, 2019; Suhardi & Panjaitan, 2025). Dalam konteks modern, pembangunan daerah tidak lagi hanya sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi mencakup integrasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan sosial budaya (Akibu, 2025; Balqis et al., 2023). Konsep pembangunan juga menekankan pemerataan akses, konektivitas, dan penguatan daya saing daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam Sektor Transportasi

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam penyelenggaraan sektor transportasi, terutama dalam memastikan ketersediaan layanan yang aman, terjangkau, dan merata (M. E. P. Sari, 2018). Tugas utama pemerintah daerah mencakup perencanaan transportasi, pengawasan operasional, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penyusunan regulasi lokal yang mendukung efektivitas mobilitas masyarakat (Jannah & Kurniati, 2025). Pemerintah daerah juga bertanggung jawab memfasilitasi digitalisasi layanan, pengumpulan data transportasi, dan peningkatan budaya keselamatan (Zein & Septiani, 2024). Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk pembiayaan dan inovasi transportasi (Sentanu & Yustiari, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan penelitian dilakukan di beberapa sarana prasarana transportasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selama dua bulan, mulai dari September

hingga Oktober 2025. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun informan penelitian tersebut akan dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian.

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kadishub Sultra
2	Ringo Taufan Laode, S.Ip.,M.Sc	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
3	Rina Sutriana, ST.,MT	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal
4	Asriyati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sultra
5	Ferima, S.Si.,MM	Kepala Tata Usaha UPTD Pelabuhan penyeberangan Torobulu-Tampo

Sumber: Data Primer (2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Visi “Maju, Aman, Sejahtera dan Religius” dalam Perspektif Transportasi

Visi pembangunan daerah merupakan kompas strategis yang mengarahkan setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks transportasi, visi Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut dapat dimaknai melalui empat perspektif utama:

a. Maju

Makna “maju” dalam sektor transportasi merujuk pada sistem yang efisien, modern, terintegrasi dan berbasis teknologi. Transportasi modern mencakup:

1) Penggunaan sistem digital seperti *Intelligent Transport System* (ITS)

Penerapan ITS memungkinkan pengelolaan transportasi yang lebih cerdas melalui pemantauan real-time, manajemen lalu lintas otomatis, dan peningkatan keselamatan (Setyobudi et al., 2025). Di wilayah kepulauan seperti Sulawesi Tenggara, ITS dapat meminimalkan risiko kecelakaan, mengoptimalkan jadwal transportasi laut dan darat, serta meningkatkan efisiensi operasional (Mokui et al., 2023). Teknologi ini juga mendukung transparansi layanan dengan menyediakan informasi perjalanan yang akurat kepada masyarakat (Fauzi et al., 2023; Setiawan et al., 2024). Hal ini mendorong tata kelola transportasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.



Gambar 1. Rancangan Antar Muka Aplikasi Pelabuhan Penyeberangan di Sulawesi Tenggara.

Sumber : Mokui et al. (2023).

2) Integrasi data antar moda melalui Satu Data Perhubungan

Integrasi data antarmoda sangat penting untuk memetakan pola perjalanan, beban angkutan, serta kebutuhan infrastruktur secara komprehensif (Arruan et al., 2025). Melalui Satu Data Perhubungan, pemerintah dapat menghindari duplikasi kebijakan, meningkatkan akurasi perencanaan, serta mempermudah sinkronisasi program antar instansi. Selain itu, data terintegrasi memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pembangunan sektor transportasi.

3) Perencanaan berbasis data spasial

Perencanaan transportasi berbasis data spasial memungkinkan pemetaan kondisi geografis, jalur mobilitas, titik risiko, dan kebutuhan infrastruktur secara lebih presisi (Arruan et al., 2025). Bagi wilayah kepulauan, analisis spasial sangat penting untuk merancang rute penyeberangan, lokasi pelabuhan, hingga prioritas investasi infrastruktur. Data spasial membantu pemerintah meminimalkan kesalahan perencanaan dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

4) Layanan transportasi publik yang mudah diakses dan transparan

Layanan transportasi publik yang mudah diakses dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung mobilitas yang lebih inklusif (Y. R. Sari & Salsabih, 2024). Transparansi informasi jadwal, tarif, dan kualitas layanan membantu mengurangi ketidakpastian perjalanan serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (Yusman et al., 2024).

Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, modernisasi transportasi sangat penting mengingat wilayah kepulauan yang membutuhkan integrasi antarmoda darat laut dan udara. Pelabuhan penyeberangan seperti Amolengo, Torobulu, Baubau, Kendari dan lainnya menjadi simpul penting dalam mendorong mobilitas dan konektivitas wilayah.

b. Aman

Keselamatan transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan (Nisak & Febrian, 2025). Adapun aspek aman dalam perspektif transportasi yang disesuaikan dengan visi Gubernur antara lain :

1) Perspektif aman dari kecelakaan karena overload penumpang di Pelabuhan

Overload penumpang menjadi ancaman serius terhadap keselamatan, karena kapal yang melebihi kapasitas berisiko kehilangan stabilitas, tenggelam, atau sulit dievakuasi saat darurat (Pribadi et al., 2024). Perspektif aman menuntut disiplin operator, penegakan regulasi, serta sistem kontrol ketat di pelabuhan. Ketertiban ini bukan hanya aspek teknis, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi nyawa dan mencegah kecelakaan yang dapat dicegah.

2) Ketersediaan fasilitas keselamatan layanan transportasi laut seperti *life jacket* dan lain sebagainya

Ketersediaan *life jacket*, alat komunikasi darurat, alarm peringatan, dan fasilitas keselamatan lainnya adalah fondasi rasa aman bagi penumpang. Tanpa perangkat ini, peluang selamat saat insiden menurun drastis. Penyedia layanan wajib memastikan jumlah, kualitas, serta aksesibilitasnya sesuai standar (Marthalina & Oktariyanda, 2024). Pengadaan fasilitas keselamatan mencerminkan komitmen untuk menjaga manusia sebagai prioritas utama dalam setiap operasional pelayaran.

3) Rasa aman dibalik masih rendahnya budaya keselamatan berlalu lintas

Rasa aman sulit tercapai apabila masyarakat masih mengabaikan aturan keselamatan seperti helm, sabuk pengaman, atau prosedur naik-turun penumpang (Satyadharma et al., 2023). Rendahnya budaya keselamatan meningkatkan risiko kecelakaan dan kerugian. Edukasi, penegakan hukum, dan pembiasaan perilaku aman sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif. Ketika masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, barulah rasa aman dapat terwujud secara menyeluruh (Ramsi et al., 2025). Sehingga akan mendorong perilaku tertib, memperkuat budaya keselamatan serta menciptakan lingkungan transportasi yang lebih teratur dan minim risiko bagi seluruh pengguna jasa transportasi.

- 4) Rasa aman sekalipun masih belum optimalnya pengawasan operasional Angkutan Umum baik darat, laut maupun penyeberangan.

Pengawasan yang belum optimal terhadap angkutan darat, laut, maupun penyeberangan membuat pelanggaran operasional lebih mudah terjadi (Alamsyah et al., 2023). Meski demikian, rasa aman tetap dapat dibangun melalui peningkatan transparansi, penggunaan teknologi pemantauan, serta penguatan regulasi. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk melaporkan pelanggaran. Kombinasi antara pengawasan bertahap dan partisipasi publik dapat menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman meski pengawasan masih berkembang.

- c. Sejahtera. Transportasi menjadi katalisator ekonomi masyarakat

Transportasi berperan besar pada biaya logistik, mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan akses pasar. Transportasi yang efektif dapat meningkatkan:

- 1) Efisiensi distribusi komoditas seperti aspal Buton, hasil laut, dan UMKM

Transportasi yang efektif mempercepat distribusi komoditas seperti aspal Buton, hasil laut, dan produk UMKM, sehingga biaya logistik menurun dan daya saing meningkat (Hado et al., 2024). Dengan konektivitas antarpulau yang baik, rantai pasok menjadi lebih stabil dan akses pasar semakin luas. Transportasi yang efisien juga mendorong pertumbuhan industri lokal, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperkuat posisi Sulawesi Tenggara sebagai pusat produksi strategis (Halik, 2025; Mawaldi & Mokodompit, 2024).

- 2) Kunjungan ke destinasi pariwisata bahari dan budaya seperti Wakatobi dan tradisi Bajo,

Sistem transportasi yang berkualitas membuka akses lebih mudah menuju destinasi seperti Wakatobi dan kawasan budaya masyarakat Bajo (Putra & Simatupang, 2025). Kemudahan mobilitas meningkatkan kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal, dan memperbesar dampak ekonomi lokal. Selain itu, transportasi yang nyaman dan aman membantu mempromosikan potensi bahari dan budaya secara lebih luas, sehingga pariwisata menjadi sektor unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Sartika et al., 2024).

- 3) Meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan terutama di pulau-pulau kecil.

Transportasi yang baik memungkinkan masyarakat di pulau-pulau kecil memperoleh akses lebih cepat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Jinca & Humang, 2023). Mobilitas guru, tenaga medis, serta logistik pendidikan dan medis menjadi lebih mudah. Hal ini mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat pemerataan pembangunan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transportasi bukan hanya infrastruktur, tetapi katalisator bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Religius

“Religius” dalam konteks transportasi bukan berarti pembangunan sarana ibadah di pelabuhan semata, tetapi lebih kepada:

1) Etika pelayanan yang tidak diskriminatif,

Religius dalam konteks transportasi berarti memberikan layanan yang berlandaskan nilai moral, seperti keadilan, empati, dan penghormatan terhadap semua pengguna (Wahidillah et al., 2025). Pelayanan yang tidak diskriminatif memastikan bahwa setiap penumpang, tanpa memandang latar belakang agama, suku, gender, atau status sosial, mendapatkan akses dan perlakuan yang sama. Prinsip ini menciptakan transportasi yang manusiawi, berkeadilan, inklusif, dan mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

2) Tata kelola yang bersih dan bebas korupsi

Nilai religius juga tercermin dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi (Windasari, 2024). Pengelolaan transportasi yang bersih memastikan bahwa anggaran, tarif layanan, serta proses perizinan dijalankan secara jujur (Salsabilla et al., 2025). Ketika integritas menjadi dasar kebijakan, kepercayaan publik meningkat, efisiensi pengelolaan membaik, dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dapat memperkuat governance transportasi.

3) Perlindungan terhadap kelompok rentan

Religiusitas transportasi menekankan kepedulian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak (Rajulan et al., 2025). Penyediaan aksesibilitas, fasilitas keselamatan, dan layanan khusus menjadi wujud nyata implementasi nilai kemanusiaan. Transportasi yang melindungi kelompok rentan mencerminkan prinsip moral untuk menjaga hak dan martabat setiap individu. Dengan demikian, keberpihakan pada yang lemah menjadi indikator penting transportasi yang beretika.

4) Penghormatan terhadap budaya lokal seperti kearifan masyarakat Bajo

Nilai religius juga diwujudkan melalui penghargaan terhadap budaya lokal, termasuk kearifan masyarakat Bajo yang hidup berdampingan dengan laut.

Transportasi yang sensitif budaya akan mempertimbangkan tradisi, pola hidup, dan pengetahuan lokal dalam perencanaan maupun operasionalnya (Abbas & Putra, 2024). Pendekatan ini mencegah konflik sosial, memperkuat harmonisasi, dan menjaga identitas masyarakat. Dengan menghormati budaya lokal, transportasi dapat menjadi bagian dari pembangunan yang berakar pada nilai-nilai spiritual dan sosial.

Transportasi yang religius berarti transportasi yang manusiawi, bermoral, dan mengutamakan pelayanan publik.

Peran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dinas Perhubungan menjadi aktor utama yang menerjemahkan visi gubernur Sulawesi Tenggara ke dalam kebijakan operasional. Peran strategisnya yang sudah dilaksanakan sejauh ini meliputi:

a. Penguatan Tata Kelola Transportasi

Penguatan tata kelola transportasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui perbaikan regulasi, peningkatan transparansi, dan digitalisasi layanan agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan menjadi lebih akuntabel. Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara meyakini bahwa dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik meningkat, koordinasi antarinstansi lebih efektif, dan penyelenggaraan transportasi menjadi lebih tertib dan responsif (Latullah et al., 2025).

b. Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan untuk meningkatkan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Satyadharma, Rachman, et al., 2024). Pembangunan ini mencakup perbaikan pelabuhan, jalan akses, terminal, serta sarana penunjang keselamatan. Infrastruktur yang memadai mempercepat distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur modern membuka peluang pengembangan pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pembangunan ini diarahkan agar selaras dengan kebutuhan wilayah serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

c. Pengawasan Operasional, Perizinan dan Keselamatan Transportasi

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara menjalankan pengawasan operasional untuk memastikan layanan transportasi sesuai standar teknis, aturan kapasitas, dan persyaratan keselamatan (Resty & Ginting, 2024). Proses perizinan diperketat melalui pengecekan administrasi dan kelayakan operasional kendaraan maupun armada laut.

Pengawasan keselamatan mencakup pemeriksaan rutin, inspeksi keselamatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan transportasi (Tohari et al., 2024). Langkah ini penting untuk mencegah *overload*, memastikan ketersediaan fasilitas keselamatan, dan mengurangi risiko kecelakaan.



Gambar 2. Upaya Sosialisasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Dishub Sultra bersama instansi lain di Kota Baubau Tahun 2025.

Sumber : Dishub Sultra (2025).

d. Kolaborasi dengan Pendekatan Pentahelix dalam Penyelenggaraan transportasi

Pendekatan Pentahelix diterapkan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam penyelenggaraan transportasi (Satyadharma, Mokui, et al., 2024; Satyadharma & Susanti, 2024). Kolaborasi ini memperkuat inovasi, mempercepat penyelesaian masalah, dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Akademisi berperan dalam riset, pelaku usaha mendukung pembiayaan dan teknologi, komunitas terlibat dalam edukasi, dan media memperkuat diseminasi informasi keselamatan. Dengan sinergi ini, pengelolaan transportasi menjadi lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Analisis Kritis terhadap Kebijakan Transportasi berbasis Visi Gubernur Sulawesi Tenggara

Terdapat beberapa kajian kritis terhadap kebijakan kritis sektor transportasi diantaranya :

a. Kecukupan Infrastruktur Transportasi

Meskipun terdapat beberapa pembangunan pelabuhan dan terminal, masih banyak fasilitas yang memerlukan peningkatan, seperti:

1) Pelabuhan Penyeberangan dengan standar eco-port

Meskipun beberapa pelabuhan telah dibangun, banyak yang belum memenuhi standar eco-port yang menekankan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan operasional ramah lingkungan (Satyadharma, Rachman, et al., 2024). Infrastruktur pelabuhan penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tenggara masih memerlukan peningkatan pada aspek sistem digital, fasilitas keselamatan, dan manajemen lingkungan. Penerapan eco-port penting untuk mendukung keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing transportasi laut dan penyeberangan (Dirmansyah et al., 2024).

2) Terminal Tipe B yang layak dan memadai di setiap kabupaten /kota di Sulawesi Tenggara

Ketersediaan Terminal Tipe B yang layak masih belum merata di Sulawesi Tenggara, sehingga konektivitas darat dan integrasi antarmoda menjadi kurang optimal. Banyak terminal membutuhkan peningkatan pada fasilitas ruang tunggu, area parkir, sistem informasi, serta keselamatan operasional. Terminal yang memadai akan meningkatkan kenyamanan penumpang, mendukung kelancaran angkutan umum, dan memperkuat jaringan transportasi regional secara lebih efisien dan berkelanjutan (Hasina & Satyadharma, 2023).

b. Kesiapan Teknologi dan Transformasi Digital

Visi “maju” menuntut teknologi sebagai fondasi. Namun di lapangan, masih terdapat kendala dan hambatan, diantaranya:

1) Kurangnya integrasi data antar kabupaten/kota

Ketiadaan integrasi data membuat sistem transportasi sulit direncanakan secara menyeluruh (Rosyid et al., 2021). Setiap kabupaten/kota cenderung memiliki data sendiri tanpa sinkronisasi, sehingga analisis kebutuhan, perizinan, dan pengawasan tidak konsisten. Akibatnya, kebijakan transportasi menjadi kurang efektif, tidak akurat, dan sulit mendukung konektivitas regional di Sulawesi Tenggara.

2) Minimnya penggunaan ITS

Penggunaan *Intelligent Transport Systems* (ITS) masih terbatas, sehingga monitoring lalu lintas, pengawasan kapal, dan manajemen terminal belum berjalan optimal (Maulana & Sahara, 2023). Minimnya teknologi ini menghambat efisiensi operasional, menurunkan kualitas layanan, dan membatasi kemampuan pemerintah merespons dinamika transportasi modern.

3) Jaringan internet yang belum stabil di pelabuhan

Internet yang tidak stabil menghambat digitalisasi layanan pelabuhan, seperti tiket online, manifest elektronik, maupun sistem keamanan berbasis sensor (Hawari & Adiyono, 2024). Ketidakstabilan jaringan menyebabkan proses pelayanan lambat, data sulit diperbarui, dan pengawasan operasional menjadi kurang efektif.

4) Rendahnya SDM digital pada level teknis.

Keterbatasan kemampuan digital SDM teknis membuat pemanfaatan teknologi transportasi tidak optimal (Asmiati et al., 2023). Banyak petugas belum terlatih mengoperasikan ITS, sistem digital pelabuhan, atau aplikasi pengawasan. Akibatnya, inovasi sulit diterapkan dan sering tidak berkelanjutan. Penguatan kapasitas digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas layanan transportasi modern.

c. Tantangan terhadap Keselamatan Transportasi

Tingginya insiden kecelakaan pada kapal bermotor kecil, angkot tidak layak, serta pelanggaran muatan barang setiap tahun menunjukkan bahwa budaya keselamatan di masyarakat maupun operator masih lemah (Nawawi et al., 2024). Banyak pengguna jasa yang belum memahami risiko keselamatan, sementara sebagian operator mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan standar teknis dan prosedur keamanan. Kondisi ini diperburuk oleh pengawasan yang belum konsisten dan rendahnya literasi keselamatan di wilayah kepulauan (Riyadi, 2025). Untuk memperkuat budaya keselamatan, diperlukan edukasi berkelanjutan yang terstruktur, melibatkan pemerintah daerah, komunitas, media, dan terutama Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan RI).

d. Masih tingginya kesenjangan akses transportasi di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara

Di sejumlah desa dan kecamatan di pulau-pulau kecil, ketergantungan pada transportasi tradisional masih sangat tinggi karena terbatasnya infrastruktur dan layanan transportasi modern (Dewi & Krisdiyanto, 2023). Kondisi ini menyebabkan biaya logistik meningkat, terutama untuk kebutuhan pokok, hasil pertanian, dan distribusi barang UMKM.

Keterbatasan sarana transportasi juga menghambat mobilitas tenaga kesehatan dan pendidikan, sehingga pelayanan publik dasar tidak dapat menjangkau masyarakat secara konsisten. Dampaknya, kualitas kesehatan dan pendidikan tertinggal dari wilayah yang memiliki akses transportasi lebih baik. Selain itu, pelaku UMKM sulit menembus pasar yang lebih luas karena hambatan distribusi. Semua ini menunjukkan bahwa transportasi belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemerataan dan kesejahteraan. Diperlukan intervensi kebijakan dan pembangunan transportasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

e. Belum optimalnya integrasi nilai religious dalam pelayanan transportasi

Transportasi berkualitas tidak hanya menekankan kecepatan dan modernitas, tetapi juga pelayanan yang etis dan manusiawi. Tantangannya adalah:

1) Masih adanya pungutan liar

Keberadaan pungutan liar mencederai prinsip pelayanan transportasi yang etis dan manusiawi (Febriansyah, 2025). Praktik ini menimbulkan ketidaknyamanan, mengurangi kepercayaan publik, serta membebani masyarakat secara ekonomi. Pungli juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas aparat.

2) Aturan yang tidak ditegakkan secara konsisten

Inkonsistensi penegakan aturan menyebabkan ketertiban operasional transportasi sulit dicapai (Jamil, 2019). Operator dan pengguna jasa cenderung mengabaikan regulasi ketika sanksi tidak jelas atau penerapannya tidak merata. Hal ini melemahkan budaya keselamatan dan menurunkan kualitas layanan.

3) Pelayanan publik yang belum optimal.

Kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi standar seperti antrean panjang, informasi tidak jelas, atau respons lambat akan menghambat pengalaman transportasi yang manusiawi (Hermansah et al., 2023). Pelayanan yang tidak optimal mencerminkan kurangnya kompetensi, fasilitas yang tidak memadai, dan minimnya orientasi pada pengguna (Asrof et al., 2025). Perbaikan SOP, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, dan monitoring berkala perlu diperkuat. Dengan pelayanan yang profesional, transportasi menjadi lebih inklusif, nyaman, dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Visi Gubernur Sulawesi Tenggara “Maju, Aman Sejahtera dan Religius” memberikan arah jelas bagi pembangunan sektor transportasi di daerah kepulauan ini. Namun,

implementasinya membutuhkan reformasi menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tata kelola, teknologi, budaya keselamatan, hingga penguatan nilai religius dalam pelayanan publik.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara berperan strategis sebagai penggerak utama transformasi tersebut. Dengan pendekatan Pentahelix, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta keberpihakan pada wilayah kepulauan, transportasi Sultra dapat menjadi instrumen perubahan yang menghadirkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan keselamatan, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Jika reformasi transportasi dilakukan secara konsisten, terukur, dan partisipatif, maka cita-cita mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

Saran dari penelitian ini yaitu untuk mewujudkan visi “Maju, Aman Sejahtera dan Religius”, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memperkuat komitmen reformasi transportasi melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, percepatan digitalisasi, serta penerapan standar keselamatan yang lebih ketat. Dinas Perhubungan harus mengoptimalkan perannya dengan memperluas dan mengoptimalkan cakupan layanan, memperbaiki manajemen data, dan meningkatkan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Selain itu, prinsip religiusitas perlu diinternalisasikan dalam etika pelayanan publik. Partisipasi masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha juga penting untuk memastikan kebijakan transportasi lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sultra.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, A., & Putra, R. E. (2024). Kearifan lokal Minangkabau: Simbiosis sosial ekonomi antara pasar nagari dengan terminal di Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(2), 215–230.
- Akibu, R. S. (2025). *Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo: Integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. Dalam *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Alamsyah, T., Marsuni, L., & Bima, M. R. (2023). Efektivitas hukum pengawasan muatan lebih (over loading) kendaraan angkutan barang: Studi pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 690–699.
- Arruan, R. D., Syaiful, T. D., Wardhani, A. K., Hasiholan, I. F., Kardita, I. P. C. P., & Sombolinggi, A. T. (2025). *Perencanaan transportasi*. ARSY MEDIA.
- Asmiati, A., Sulastriani, S., & Citta, A. B. (2023). Pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi transportasi laut dalam era Revolusi Industri 4.0. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 6184–6197.
- Asrof, S., Irwansyah, I., & Fahrudin, F. (2025). Efektivitas penerapan Mall Pelayanan Publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(3), 1468–1480.

- Balqis, D., Wahyuni, A. M., Tarihoran, K. K. B. S., Junita, D., Prasatya, V., & Fithra, H. (2023). Implementasi lingkungan dalam pembangunan infrastruktur untuk kehidupan berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil dan Arsitektur (Senastesia)*, 1, 7.
- Bangsawan, G. (2024). Peran inovasi berkelanjutan dalam transformasi ekonomi kepulauan yang inklusif. *Jurnal Archipelago*, 3(1), 41–54.
- Damanik, A. (2019). Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan daerah. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 1(2), 171–186.
- Dewi, K., & Krisdiyanto, A. (2023). Pengembangan sistem transportasi masa depan: Mobilitas berkelanjutan dan otonom di Jawa Barat. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(9), 750–760. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.626>
- Dirmansyah, D., Setiono, B. A., & Nasihah, A. (2024). Implementation of the green port concept in PT. Terminal Petikemas Surabaya. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan*, 15(1), 121–136.
- Fauzi, A. A., Harto, B., Dulame, I. M., & Pramuditha, P. (2023). *Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai sektor pada masa Society 5.0*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriansyah, U. W. (2025). *Tilang elektronik dan jalan menuju tertib: Inovasi hukum di era digital dan nilai-nilai syariah*. PT Revormasi Jangkar Philosophia.
- Hado, Ilham, V. A., & Satyadharma, M. (2024). Model pengembangan Pelabuhan Nambo untuk optimalisasi distribusi aspal Buton dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Buton. *Jurnal Media Konstruksi*, 9(4), 347–356.
- Halik, F. M. (2025). Strategi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sulawesi Tenggara: Kajian potensi daerah berbasis sektor unggulan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(1), 125–146.
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi pengembangan fungsi terminal penumpang Tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Hawari, S. M., & Adiyono, S. (2024). *Transformasi digital pada manajemen pelabuhan*. Penerbit NEM.
- Hermansah, Yamin, A., & Suparman. (2023). *Meningkatkan kualitas layanan publik di pelabuhan: Peran responsivitas dan kemampuan pelayanan pegawai*. Jakad Media Publishing.
- Jamil, M. S. (2019). Perwujudan good governance sebagai strategi penegakan hukum dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat. *E-Logis: Jurnal Ekonomi Logistik*, 1(1).
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). Analisis peran pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 231–251.
- Jinca, M. Y., & Humang, W. P. (2023). *Perencanaan dan pengembangan transportasi wilayah kepulauan*. Nas Media Pustaka.
- Latullah, R. H., Sulisty, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative governance dalam pengawasan angkutan barang umum yang berkontribusi terhadap

- program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37.
- Marthalina, G. L., & Oktariyanda, T. A. (2024). Analisis kualitas pelayanan pada transportasi publik “SI BENTENG” di Kota Tangerang. *Publika*, 12(3), 803–812.
- Maulana, A. A., & Sahara, S. (2023). Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pelabuhan. *Wahana*, 75(2), 149–158.
- Mawaldi, I., & Mokodompit, E. A. (2024). Pengembangan industri maritim di Sulawesi Tenggara: Peluang dan tantangan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 371–376.
- Mokui, H. T., Satyadharma, M., Prasetyo, E. W., & Putera, Z. (2023). Desain digitalisasi jadwal dan rute kapal feri di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, 7(3), 300–310.
- Nawawi, C. I., Santoso, R., & Purnomo, B. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi keselamatan operasional kapal di Pelabuhan Merak. *Ranah Research*, 7(1), 498–502.
- Nisak, R. Y., & Febrian, R. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pembinaan keselamatan transportasi. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 109–118.
- Nusriah, A. M. (2025). Kajian interaksi wilayah berbasis model gravitasi dan analisis ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Peweka Tadulako*, 4(2), 169–189.
- Pribadi, T., Rahayu, T., & Eddi, E. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi nakhoda dalam pengambilan keputusan saat kapal mengalami situasi bahaya. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(10), 851–867.
- Putra, A. A., & Simatupang, M. (2025). Rekayasa kebijakan transportasi terintegrasi dalam mendukung ekosistem pariwisata Kota Baubau dan Wakatobi. *Bridging Journal of Islamic Digital Economics and Management*, 2(3), 13–22.
- Rajulan, M., Sulisty, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Semangat pahlawan sebagai teladan dalam membangun transportasi berkeadilan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(4).
- Ramsi, R., Firman, A., Salam, M., PS, M., Hado, H., Putra, A. A., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Nasrul, N., Laode, R. T., & Satyadharma, M. S. (2025). Upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan tertib parkir di Kabupaten Bombana. *Jurnal Gema Ngabdi*, 7(2), 218–224.
- Resty, K. D., & Ginting, W. O. (2024). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan SOP bagi pengemudi angkutan kota. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 3548–3561.
- Riyadi, S. (2025). Manajemen mutu transportasi laut: Studi pada upaya peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang. *Jurnal Cakrawala Bahari*, 8(1), 98–108.
- Rosyid, A., Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., Razi, M. A. M., Isradi, M., Muchayan, A., & Sukoco, A. (2021). Integrasi transportasi publik dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam *eMobility: Sustainable Mobility Transportasi Publik dan Teknologi GIS* (pp. 8–25). IPEST.
- Salsabilla, M., Anwar, M. Y., Putri, A. S. R. L., Warastika, T. E., & Majdi, A. S. (2025). Tinjauan hukum tata negara terhadap izin operasional transportasi truk di Kota

- Banjarmasin. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 3759–3766.
- Sari, A. R. (2024). *Reformasi pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Sari, M. E. P. (2018). Peran pemerintah dalam penyediaan akses pelayanan publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1–12.
- Sari, Y. R., & Salsabih, Z. F. (2024). Inovasi transportasi publik dan kepuasan masyarakat: Studi atas layanan Bus Trans Banyumas. *Journal of Politics and Democracy*, 3(2), 110–120.
- Sartika, S., Abbas, B., Supriaddin, N., Nur, M., & Tambunan, R. (2024). Analisis promosi pariwisata dan budaya masyarakat lokal dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Baubau. *Syntax Idea*, 6(7), 3164–3180.
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi sektor darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Satyadharma, M., Hado, H., & Mahdar, M. (2023). Analisis pesan terkait rendahnya kesadaran berlalu lintas pada kanal YouTube Laeku. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 164–174.
- Satyadharma, M., Mokui, H. T., Putra, A. A., Jaya, L. M. G., Kadir, A., & Arsyad, L. O. M. N. (2024). Peran teknologi informasi dan mekanisme collaborative governance mendukung penyelenggaraan transportasi berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Media Konstruksi*, 9(3), 211–218.
- Satyadharma, M., Rachman, R. M., Sabar, A. D., Saputra, Y. J., & Hado, H. (2024). Pelabuhan hijau dalam mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. *Jurnal Teknik*, 18(1), 32–39.
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Yustiari, S. H. (2024). *Mengelola kolaborasi stakeholder dalam pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Setiawan, M. A., Seminar, K. B., Sartono, B., & Fitriati, R. (2024). Tata kelola digital layanan lalu lintas jalan tol di Indonesia: Studi aplikasi Travoy Jasa Marga. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 1–16.
- Setyobudi, R., Octavia, S. N., Yulistiyanti, L. D., Buang, N., Aprian, S., Muta'ali, L., & Julians, A. R. (2025). *Smart city technology: Konsep, inovasi, dan implementasi*. Star Digital Publishing.
- Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). Analisis strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42–55.
- Sulistyo, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Ekonomi berbagi dan disrupsi pasar transportasi di Indonesia: Kajian literatur atas peran transportasi online dalam transformasi ekonomi. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(1), 29–40.
- Tohari, M., Susilowati, T., & Prayuda, E. (2024). Inspeksi keselamatan terhadap moda transportasi angkutan umum menurut UU No. 22 Tahun 2009. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(2), 51–62.
- Trijaya Kendari. (2025). Gubernur serahkan RPJMD visi maju aman sejahtera dan religius jadi arah pembangunan Sultra lima tahun ke depan. *Trijayakendari.com*.

<https://www.trijayakendari.com/gubernur-serahkan-rpjmd-visi-maju-aman-sejahtera-dan-religius-jadi-arrah-pembangunan-sultra-lima-tahun-ke-depan/>

- Wahidillah, N., Apriyani, S. R., Meilani, V. R., & Ashari, Z. M. (2025). Pelayanan publik dalam perspektif Islam: Landasan, prinsip, dan implementasi di era kontemporer. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 1–16.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam perspektif Islam. *Hasina: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10–25.
- Yunus, M., Mawardi, T. F., Alexandri, M. B., Satria, R., Tabrani, M., Kesuma, T. M., & Siregar, M. R. (2024). *Investasi dan reformasi transportasi kota*. Syiah Kuala University Press.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital*. Serasi Media Teknologi.
- Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi pemerintahan daerah: Katalis untuk integrasi dan optimasi good governance*. Sada Kurnia Pustaka.